

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus Peran PDI Perjuangan dalam Program Insentif Guru Madrasah
Diniyah Kabupaten Batang)**



**Oleh:
Nove Kurniati Sari
NIM. 18204090005**

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan (M.Pd) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nove Kurniati Sari
NIM : 18204090005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2020

Saya yang menyatakan,



Nove Kurniati Sari

NIM. 18204090005

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nove Kurniati Sari
NIM : 18204090005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Dua saya, jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran mengharap ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 15 April 2020



Nove Kurniati Sari, S. Pd.

NIM. 18204090005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nove Kurniati Sari
NIM : 18204090005
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2020

Saya yang menyatakan,



Nove Kurniati Sari, S. Pd.

NIM. 18204090005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474 Fax. (0274) 58611
Tarbiyah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN (Studi Kasus Peran PDI Perjuangan dalam
Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang)
Nama : Nove Kurniati Sari
NIM : 18204090005
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 19 Mei 2020

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan
Islam

Yogyakarta, 13 Juni 2020

Dekan



Dt. Ahmad Arifi, M. Ag.

NIP. 0661121 199203 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN (Studi Kasus Peran PDI Perjuangan dalam
Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten
Batang)

Nama : Nove Kurniati Sari
NIM : 18204090005
Jenjang : Magister
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Pembimbing/
Ketua : Dr. Imam Machali, M. Pd. ()

Penguji I : Dr. Zainal Arifin, M.S.I. ()

Penguji II : Dr. Na'imah, M. Hum. ()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2020

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A/95

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Peran PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Yang ditulis oleh:

Nama : Nove Kurniati Sari

NIM : 18204090005

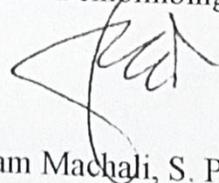
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Pembimbing



Dr. Imam Machali, S. Pd. I., M. Pd.

ABSTRAK

Nove Kurniati Sari. Peran Partai Politik dalam Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Peran PDI Perjuangan Kabupaten Batang dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang, Jawa Tengah). Tesis. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Magister Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Permasalahan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk Partai Politik yang merupakan pilar demokrasi. Partai politik terutama PDI Perjuangan yang memiliki basis massa yang relatif banyak, berperan dan berkontribusi aktif dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan di daerah termasuk program yang berhubungan dengan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa latar belakang peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang?, 2) Bagaimana peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan Madrasah Uswatun Hasanah. Wawancara dilakukan dengan anggota PDI Perjuangan, serta guru Madrasah Diniyah, dan masyarakat terkait. Dokumentasi yaitu dokumen terkait dengan Program Insentif seperti Surat Keputusan, contoh Proposal pengajuan, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor latar belakang peran PDI Perjuangan dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang adalah faktor-faktor seperti Faktor Pemerintah berjalan dan Faktor Kondisi Madrasah Diniyah dan Masyarakat. 2) Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang dilihat dari tiga aspek meliputi Peran PDI Perjuangan dalam Aspek Kepartaian yaitu Komunikator Politik dan Pengawasan Proses Tindaklanjut; Peran PDI Perjuangan dalam Aspek Perwakilan dalam Lembaga Legislatif yaitu Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi, Mediator Antar Lembaga, dan Negosiasi dan Lobi Politik; serta Peran berdasarkan Fungsi Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 pasal 11) yaitu Menyerap, Menghimpun, dan Menyalurkan Aspirasi, Sarana Mediasi dan Negosiasi Politik, Sarana Pengatur Konflik, dan Rekrutmen Politik, Menjaring, dan Menyiapkan Calon-calon Pemimpin. 3) Penyebab PDIP berperan dalam Program Insentif adalah Piramida Penduduk, Rasio Ketergantungan, Persentase Penduduk Beragama Kabupaten Batang, serta Isu Kesejahteraan Guru.

Kata Kunci: Partai Politik, Kebijakan Pendidikan, PDI Perjuangan, dan Program Insentif

ABSTRACT

Nove Kurniati Sari. The Role of Political Parties in Education Policy (Case Study of the Role of PDI Perjuangan in the Madrasah Diniyah Teacher Incentive Program of Batang District, Central Java). Thesis. Yogyakarta: Masters of Islamic Education Management Study Program of the Faculty of Tarbiyah and Teaching Science UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Problems with the welfare of Madrasah Diniyah teachers require participation from various parties, including Political Parties which are pillars of democracy. Political parties, especially Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), which have a relatively large mass base, play an active role and contribute to policies implemented in the regions, including programs related to the welfare of Madrasah Diniyah teachers. The problems in this study are: 1) What is the background of the role of PDI Perjuangan in the Diniyah Madrasah Teacher Incentive Social Program in Batang Regency?, 2) What is the role of the PDI Perjuangan in the Diniyah Madrasah Teacher Incentive Social Program in Batang Regency?

This research is a qualitative descriptive study, and uses data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews. Observations were made on the DPC PDI Perjuangan regency office in Batang and Madrasah Uswatun Hasanah. Interviews were conducted with PDI-P members, Madrasah Diniyah teachers, and related communities. Documentation, namely documents related to the Incentive Program such as Decree, sample submission proposal, and other related supporting documents.

The results of this study indicate that: 1) The background factors of the role of PDI Perjuangan in the Diniyah Madrasah Teacher Incentive Program in Batang Regency are factors such as the current Government Factors and the Conditions of Diniyah and Community Madrasah Conditions. 2) The Role of PDI Perjuangan in the Social Incentive Program for Madrasah Diniyah Teachers in Batang Regency viewed from three aspects including the Role of PDI Perjuangan in the Party Aspects, namely Political Communicators and Guarding the Follow-up Process; Role of PDI-Struggle in the Aspect of Representation in the Legislative Institution, namely Accommodating and Following Up on Aspirations, Interagency Mediators, and Political Negotiations and Lobbying; and Roles based on the Function of Political Parties (Law No. 2 of 2011 article 11), namely Absorbing, Gathering, and Distributing Aspirations, Means of Mediation and Political Negotiations, Means of Conflict Management, and Political Recruitment, Recording, and Preparing Prospective Leaders. 3) The causes of PDIP's role in the Incentive Program are the Population Pyramid, the Dependency Ratio, the Religious Population Percentage of Batang Regency, and the Teacher Welfare Issue

Keywords: Political Parties, Educational Policy, PDI Perjuangan, and Incentive Programs

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa : 58)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Almamater tercinta

Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Za		Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad		Es (titik di bawah)
ض	Dad		De (titik di bawah)
ط			Te (titik di bawah)
ظ			Zet (titik di bawah)

ع		‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرمة الأولياء	Ditulis	Karaamah al-auliya
---------------	---------	--------------------

3. Bila Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

..... [َ]	Kasrah	Ditulis	i
..... [َ]	Fathah	Ditulis	a
..... [ُ]	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	a
يسعي	Ditulis	yas’a
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	karim
Dammah +wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْمَلِكُ	Ditulis	al-Maliku
الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu

- b. Bila diikuti huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
الشَّمْسُ	Ditulis	as-syamsu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan limpahan karunia-Nya berupa kekuatan sehingga penulisan tesis yang berjudul:

“Peran Partai Politik dalam Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Peran PDI Perjuangan dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang)”

Penyelesaian skripsi ini peneliti mendapatkan banyak bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak. Untuk kesempatan kali ini, ijin saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K. H. Yudian wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ahmad Arifi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si., selaku Kepala Program Studi (Kaprod) Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Sumedi, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi (Kaprod) Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Imam Machali, M. Pd. selaku pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan waktu, pengarahan, dan saran hingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Na'imah, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi masukan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

7. Seluruh Dosen Magister FITK khususnya prodi S2 MPI UIN Sunan Kalijaga yang telah berkontribusi menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selama berkuliah di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas FITK UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuan layanan pustaka kepada peneliti selama menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
10. Jajaran staf Dinas Humas, Dinas Kominfo, Kementerian Agama, dan staf-staf pemerintahan daerah Kabupaten Batang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu atas bantuannya dalam menyediakan informasi dan dokumen pendukung penelitian ini.
11. Seluruh jajaran tenaga pendidik di Madrasah Diniyah Uswatun Hasanah yang telah bersedia memberikan informasi dan waktu untuk melakukan wawancara dengan peneliti.
12. Bapak Sumadi, Ibu Siti Fatimah, dan Adik Dwi Putri yang telah memberikan dukungan segenap hati baik moril dan materiil serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik tanpa kendala yang berarti.
13. Teman-teman terbaik Kelas A MPI Semester Ganjil 2018 yang selalu bersedia berdialog dan membantu saat-saat penting serta menghibur di masa-masa stres.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis.

Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin.

Yogyakarta, 30 April 2020

Nove Kurniati Sari



DAFTAR ISI

PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN PENGUJI UJIAN TESIS.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Berfikir	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian	31
BAB II PERAN PARTAI POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	
A. Partai Politik	33
1. Konsep Partai Politik	33

2. Karakteristik dan Prinsip Dasar Partai Politik	36
3. Peran Partai Politik	38
4. Politik dalam Pendidikan	44
B. Politik Islam	48
1. Negara dan Islam	48
2. Konsep <i>Siyasah</i> syar'iyah dan <i>Fiqh</i> Politik	50
C. Kebijakan Pendidikan	53
1. Konsep Kebijakan Pendidikan	53
2. Perumusan (Formulasi) Kebijakan Pendidikan.....	55
3. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan.....	61
BAB III PROFIL KABUPATEN BATANG DAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN BATANG	
A. Profil Kabupaten Batang	65
B. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang	84
B. Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang	99
C. Penyebab PDI Perjuangan berperan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang.....	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian, 18
- Gambar 2 Skema Hubungan Antara Rakyat/Kepentingan, Parpol, dan Lembaga Lain dalam Sistem Demokrasi, 39
- Gambar 3 Bagan Dinamika Peraturan/Kebijakan dan Parlemen/Legislatif, 47
- Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Batang, 66
- Gambar 5 Skema Latar Belakang Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang, 98
- Gambar 6 Skema Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang, 127
- Gambar 7 Skema Penyebab PDI Perjuangan Berperan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang, 132



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2017, 69
Tabel 2	Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal, 71
Tabel 3	Skema Demokrasi Internal PDI Perjuangan, 79
Tabel 4	Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, 82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Observasi, 143
Lampiran 2	Pedoman Dokumentasi, 145
Lampiran 3	Transkrip Wawancara, 147
Lampiran 4	Surat Keputusan Bupati, 162
Lampiran 5	RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, Tabel 6.12, 165
Lampiran 6	AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2019 – 2024, 166
Lampiran 7	UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 169
Lampiran 8	Dokumentasi Foto, 170



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan di kalangan masyarakat umum dan kalangan akademisi seputar permasalahan profesi guru masih sarat dengan topik-topik seputar sumber daya dan kesejahteraan. Guru sebagai suatu komponen penting dalam pendidikan bangsa, dimana keberadaannya sangat krusial dalam proses pembangunan dan perbaikan generasi penerus bangsa untuk dapat bersaing dan bertahan dalam arus globalisasi yang serba instan dan bergantung pada teknologi, sehingga terjadi pergeseran nilai dan norma yang menuntut adaptasi penuh dari masyarakat yang hidup di zaman ini¹. Guru adalah komponen sumber daya yang menentukan maju mundurnya pendidikan di suatu negara. Dengan kata lain, semakin berkualitas guru, maka kualitas peserta didik yang dihasilkan pun akan semakin baik.

Peran guru yang sangat krusial tersebut telah tercantum dalam perundang-undangan yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik². Namun Peran tersebut akan menemui kendala dalam proses pelaksanaannya jika hak-hak dan kebutuhan dasar para guru tidak terpenuhi dengan baik. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan kebutuhan kepada guru agar keberlangsungan hidup guru sebagai anggota masyarakat dapat berjalan dengan baik. Guru memiliki hak untuk

¹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm 7.

² Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 20

memperoleh penghasilan yang memadai serta jaminan kesejahteraan demi menunjang kehidupan sehari-harinya³. Jaminan kesejahteraan dapat berupa hal-hal mendasar seperti makanan yang layak, pakaian yang pantas, dan pengakuan dari masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan ini perlu dipenuhi demi membantu tugas profesional guru. Profesionalitas guru yang dinilai merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran yang baik, namun faktor lain yang juga penting namun terabaikan adalah kesejahteraan guru⁴.

Posisi guru dalam tatanan masyarakat Indonesia secara formal berada di level terhormat, namun segi materialnya yang masih menjadi sumber keprihatinan. Banyak guru di Indonesia yang mengalami kemerosotan dari segi kepemilikan materi bahkan ada beberapa kasus dimana guru masih berada di bawah garis kemiskinan⁵. Hal ini juga dialami oleh guru-guru di lembaga Madrasah Diniyah yang gajinya belum dapat dikategorikan layak⁶. Adapun gaji yang diterima guru madrasah diniyah dikategorikan sebagai honor atau ucapan terima kasih dari madrasah tempatnya mengajar dan jumlahnya tidak seperti gaji normal guru di lembaga pendidikan formal⁷.

³ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pasal 40, ayat (1), poin (a)

⁴ M. Fahmi Maulana. *Dampak Kesejahteraan Guru PAI MI/SD Terhadap Kompetensi Profesional (Studi Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Tesis, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2018), hlm 2

⁵ H. A. R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 20.

⁶ Nuriyatun Nizah, "Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis", dalam *Jurnal Edukasia*, Vol. 11, No. 1, Februari 2016, hlm 194

⁷ Syuhud dan Wiwin Sugianto, "Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren", *Jurnal Tarbiyatuna*, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018, hlm 164

Pendidikan Diniyah non-formal tercantum dalam PP No. 55 Tahun 2007 pasal 21 ayat 1, dimana ia diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Ta'lim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Sedangkan prose penyelenggaraannya ada di pasal 5, yaitu Diniyah Takmiliah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi⁸. Terlepas dari tercantumnya pendidikan diniyah dan Pendidikan Al-quran, namun segi kelayakan kesejahteraan yang diterima guru masih perlu ditinjau ulang. Usaha pemberian honor kepada guru madrasah diniyah masih berdasarkan kebutuhan masyarakat akan kehadiran madrasah diniyah, sehingga para guru dihargai dengan insentif yang sesuai⁹.

Madrasah, pesantren, surau, dan masjid merupakan bentuk lembaga non-formal yang hadir dari harapan masyarakat untuk keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang anak-anak dapat di sekolah formal¹⁰. Dalam lembaga ini, guru (ustad/ustadzah) pendidikan agama Islam memiliki peran sentral dalam memotivasi serta menumbuhkan akhlak baik dalam diri peserta didik, baik di dalam kelas maupun kehidupannya sehari-hari. Lembaga-lembaga non-formal tersebut berkontribusi besar membangun bangsa, tidak sekedar sebagai pelengkap pendidikan formal namun juga mencetak generasi Islami berwawasan kebangsaan¹¹. Peran penting guru madrasah diniyah tentu perlu ditunjang dengan

⁸ PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pasal 5.

⁹ Nuriyatun Nizah, "Dinamika...", hlm 194

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7183 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru/Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliah Tahun Anggaran 2018, hlm 1

perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kualitas guru bagi segi pendidikan maupun segi lainnya. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pemberian insentif pada Guru Madrasah Diniyah.

Gejala kepuasan kerja guru yang rendah dapat mempengaruhi kualitas pengajarannya. Jabatan profesional guru di lembaga madrasah diniyah perlu diiringi dengan jaminan hidup memadai agar kepuasan kerja meningkat serta peningkatan kualitas dalam melakukan pekerjaannya. Dengan kondisi realita bahwa masih terdapat ribuan guru/ustadz Madrasah Diniyah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi dengan meningkatnya kebutuhan sehari-hari¹². Jika kesejahteraan guru madrasah diniyah terus berada pada keprihatinan, dapat terjadi penurunan minat para guru untuk mengajar, sehingga peserta didik kehilangan sumber pembelajaran etika, spiritual, dan moral yang memadai untuk bekal kehidupannya.

Permasalahan diatas diidentifikasi dan menjadi aspirasi publik yang telah diperbincangkan di berbagai forum di Kabupaten Batang. Sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah Madrasah Diniyah yang banyak dan memerlukan perhatian lebih dari penguasa untuk menjaga kelestariannya. Dan sebagai partai dengan kursi terbanyak hasil pemilu 2014¹³, PDI Perjuangan memiliki peran dalam proses identifikasi persoalan insentif guru Madrasah Diniyah untuk diproses

¹² *Ibid.*

¹³ Data hasil Form DB1 Pemilu 2014 yang dikirimkan dan diplenokan pada Kabupaten/Kota, Website Resmi Komisi Pemilihan Umum, https://pemilu2014.kpu.go.id/da1_dprd2.php, diakses 12 Januari 2020 pukul 20.29

sebagai salah satu program formal yang dijalankan di Kabupaten Batang. Konteks kepartaian PDI Perjuangan sebagai organisasi berbasis massa bergantung terhadap masyarakat mayoritas, serta sebagai upaya memenuhi kriteria politik sebagai perwakilan dan pengusung suara dari rakyat, maka sebagai sebuah partai dominan, PDI Perjuangan berperan dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat, menetapkan prioritas, dan mempertimbangkan rumusan-rumusan kebijakan¹⁴, memiliki potensi besar dalam memperjuangkan sebuah kebijakan insentif guru madrasah diniyah dalam ranah legislatif. Hal ini merupakan hasil dari kondisi objektif politik modern, dan di Indonesia sendiri, muslim sebagai kelompok mayoritas merupakan bagian krusial bagi partai politik.

PDI Perjuangan memiliki basis pendukung yang kuat di Kabupaten Batang. Pada pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak di Dapil Batang I sampai IV, dan berada di posisi kedua di Dapil Batang V¹⁵. PDI Perjuangan juga memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Batang dengan jumlah 10 kursi, sementara PKB berada di urutan kedua dengan jumlah 8 kursi¹⁶. Dominasi PDI Perjuangan di Kabupaten Batang menurun dalam Pemilu Legislatif 2019. PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak di Dapil I dan Dapil III,

¹⁴ David C. Nice, "State Party Ideology and Policy Making", in *Policy Studies Journal*, Vol. 13, Issue 4, 1 Jun 1985, pp 780.

¹⁵ Data hasil Form DB1 Pemilu 2014 ..., diakses 12 Januari 2020 pukul 20.29

¹⁶ Daftar Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Batang Periode Tahun 2014 – 2019, Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jateng, <https://kesbangpol.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/DPRD-KABUPATEN-BATANG-2014-2019.pdf> diakses tanggal 12 Januari 2020 pukul 21.02

sedangkan Dapil II, IV, dan V didominasi oleh PKB¹⁷. Perolehan kursi di DPRD Kabupaten juga menurun menjadi 8 kursi¹⁸. Walaupun demikian, PDI Perjuangan tetap memiliki Peran vital dan basis pendukung yang besar di Kabupaten Batang, serta merupakan salah satu partai politik di urutan teratas dalam Pemilu 2019 tersebut.

Partai politik merupakan salah satu bentuk kelompok kepentingan didalam dinamika pemeritahan serta salah satu pilar demokrasi di Indonesia¹⁹. Partai politik memiliki Antusiasme dan tanggapan partai politik terhadap aspirasi di ranah publik berdampak secara signifikan terhadap keberhasilannya dalam memperjuangkan tujuan partai tersebut²⁰. Ini adalah salah satu bentuk strategi sebuah partai politik sebagai sebuah kelompok kepentingan dalam menjaring pendukung dan simpatisan sebanyak mungkin, dalam upayanya untuk mempertahankan popularitas dan kedudukan diplomatisnya dalam pemerintahan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di wilayah Kabupaten Batang menerapkan strategi ini dalam perjalanan politiknya sejak disahkan oleh Megawati Soekarno Putri pada 1 Februari 1999²¹. PDI Perjuangan Kabupaten Batang memiliki Peran penting dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Batang, dimulai dari tahap identifikasi masalah sampai ke tahap pengajuan sebagai alternatif kebijakan. Penelitian ini

¹⁷ Data hasil Pemilu 2019, Website Resmi Komisi Pemilihan Umum, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-hasil/wilayah> diakses 12 Januari 2020 pukul 21.38

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011, Lembar Penjelasan Atas Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Bagian I

²⁰ Berry 1997 dalam Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan ...*, hlm 133

²¹ Piagam Perjuangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 – 2024, hlm 2

berfokus pada Peran PDI Perjuangan dalam kebijakan pendidikan khususnya dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang.

Kebijakan Pendidikan yang menyeluruh tidak dapat terwujud tanpa adanya penyerapan aspirasi. Dalam upaya memenuhi tuntutan solusi atas permasalahan masyarakat, perlunya proses perumusan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif. Hal ini dilakukan agar dalam proses penerapannya, kebijakan pendidikan tersebut dapat mendatangkan penyelesaian solusi atas permasalahan yang melatarbelakangi formulasi kebijakan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan, yang dimulai dengan proses penyerapan aspirasi di masyarakat dan dilengkapi dengan mengidentifikasi masalah baik oleh aktor perumusan kebijakan dalam legislatif maupun dari forum pengurus partai politik PDI Perjuangan itu sendiri. Berlanjut pada tahap pemilihan agenda kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan untuk memilah tingkat urgensi sebuah permasalahan yang kemudian diajukan sebagai sebuah kebijakan dalam peraturan daerah.

Tahap-tahap proses formulasi kebijakan diatas akan dipergunakan untuk mengetahui seperti apa kontribusi dan seberapa besar Peran sebuah partai politik dominan di sebuah region terhadap kebijakan pendidikan di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis peran dari partai politik serta melihat kronologi dan latar belakang sebuah kebijakan pendidikan dibuat. Dengan demikian, selain dapat menelusuri proses perumusan kebijakan secara urut dan benar, dapat pula diketahui tata cara penyerapan aspirasi di masyarakat dan porsi peran dari partai politik dalam sebuah kebijakan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi pembahasan dan penelitian pada masalah-masalah, yakni:

1. Apa latar belakang Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang?
3. Mengapa PDI Perjuangan berperan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang kebijakan pendidikan Kabupaten Batang, Jawa Tengah khususnya dari sudut pandang Partai Politik.
2. Mengetahui seberapa besar anggota Partai Politik berperan dalam kebijakan program insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang.
3. Mengetahui faktor pemicu PDI Perjuangan mengambil peran dalam Program insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang.

Mengacu kepada tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat dalam bidang pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan kesinambungan antara ilmu pendidikan dan politik pada umumnya, menyangkut peran PDI Perjuangan dalam formulasi kebijakan pendidikan Islam
- b Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pendalaman partai politik dan perannya terhadap pendidikan Islam serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a Bagi peneliti

Peneliti dapat memahami konsep kebijakan khususnya pendidikan Islam yang berlaku di Indonesia

b Bagi dunia pendidikan

Elemen pendidikan memahami bahwa politik dan pendidikan memiliki kesinambungan yang kompleks dan unik. Serta memicu kesadaran partisipasi akademisi ke dalam politik agar kebijakan di masa depan lebih menyeluruh.

c Bagi pemerintahan

Pemerintahan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan kebijakan pendidikan .

d Bagi partai politik

Partai politik dapat menyadari peran strategisnya dalam kebijakan pendidikan Islam dan memaksimalkan kontribusi dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini sehingga ranah teori yang dapat penulis jabarkan menjadi lebih luas. Sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, akan tetapi penulis menemukan penelitian-penelitian yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Tesis oleh Budi Supriyanto berjudul “*Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Magelang*”

Penelitian ini menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Magelang melakukan proses penyerapan aspirasi melalui reses dan kunjungan lapangan dengan tujuan melihat perkembangan fakta yang terjadi kemudian menyusun program berdasarkan urgensi dan tingkat prioritas permasalahan yang ada. Mekanisme penyerapan aspirasi dilakukan tidak hanya berbentuk rapat kerja (raker), namun juga berbentuk pendekatan informal kepada masyarakat dalam kegiatan seperti kerja bakti, pengajian serta karang taruna. Bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan ke DPRD terbagi dua yaitu administratif dan politik. Administratif ditindak lanjuti dalam bentuk pembahasan dalam Raker

dan pengajuan kepada Pemerintah Daerah untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan politis, berupa sikap mendukung oleh anggota DPRD.

Penelitian ini menemukan bahwa proses serap aspirasi tergolong minim, namun tidak mengindikasikan kelalaian anggota DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan dan mewakili suara rakyat. Hal ini dapat disebabkan proses implementasi kebijakan yang tidak maksimal dalam jajaran eksekutor kebijakan, sehingga tujuan utama dan solusi yang diharapkan tidak dirasakan oleh masyarakat.

2. Penelitian kolaborasi oleh Dosen UKDW dan Dosen UMY yaitu Istana dan Dr. Suranto, M. Pol. yang berjudul “*Peran Partai Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo Periode 2010-2012*”²².

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo berproses secara berjenjang dan struktural dalam sistem kepartaian. DPC PDI Perjuangan menjalankan kewenangannya kebijakan yang bersifat aplikatif dan operasional, sedangkan kebijakan yang bersifat strategis dan ideologi merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Pusat (DPP). DPC PDI Perjuangan berkontribusi dalam pasokan data dan tambahan informasi dalam proses perumusan kebijakan. Perumusan

²² Istana dan Suranto, “Peran Partai Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo Periode 2010-2012”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 2, Juni 2014

kebijakan yang diajukan berdasarkan asas manfaat dan kepentingan publik diatas kepentingan golongan.

Proses perumusan kebijakan berawal dari forum internal partai dengan mempertimbangkan aspek situasi politik terbaru serta kemungkinan kondisi di masa depan atas kebijakan politik yang dipilih. Hasil pembahasan internal ini adalah gambaran umum atas masalah yang dihadapi masyarakat yang kemudian berproses dan ditetapkan sebagai alternatif kebijakan partai. Alternatif-alternatif tersebut mengalami proses identifikasi tujuan, manfaat, dan target pencapaian. Proses ini berfungsi dalam proses memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah ditentukannya alternatif kebijakan yang paling tepat, akan diteruskan kepada jenjang struktural berikutnya untuk diterapkan sebagai kebijakan partai di DPRD, atau sebagai kebijakan daerah yang dilaksakakan oleh Bupati.

3. Disertasi oleh Ismail dengan judul “*Politik Pendidikan Islam Di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah)*”²³

Penelitian ini mengungkapkan bahwa, Pertama, permasalahan yang melatarbelakangi munculnya kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah adalah faktor realita sosial dan politik seperti problem internal pesantren, kondisi pendidikan di Jawa Timur, dan perubahan regulasi pendidikan

²³ Ismail, “*Politik Pendidikan Islam Di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah)*”, Disertasi, (Surabaya: PPS UIN Sunan Ampel, 2017)

nasional. Proses perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak seperti eksekutif, legislatif, dan terutama masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat umum yang dimaksud dalam bentuk hasil pengajuan dari masing-masing lembaga pendidikan yang dianalisis isi dan muatannya. Sehingga kebijakan yang disusun bersifat detail dan tepat sasaran. Hal ini juga didukung proses verifikasi dari Dinas Pendidikan Daerah dan Kementerian Agama, sehingga proses validasi usulan dari lembaga pendidikan dapat ditinjau secara objektif.

Proses penyusunan kebijakan pengembangan madrasah diniyah terdiri atas tiga tahap yaitu pra-keputusan, tahap eksekusi pengambilan keputusan, dan tahap pasca keputusan. Pra keputusan berisi tahap dimana aktor kebijakan seperti Gubernur dan jajarannya menemukan atau mendapat rekomendasi permasalahan yang dihadapi di Provinsi Jawa Timur. Kemudian tahap selanjutnya adalah prumusan kebijakan. Tahap ini adalah tahap berbasis data, dan dibakukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi program pembangunan provinsi Jawa Timur untuk 5 tahun kedepan, termasuk didalamnya program pengembangan Madrasah Diniyah.

Kemudian tahap implementasi kebijakan pengembangan madrasah diniyah didukung oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi Jawa Timur serta dukungan masyarakat yang secara sinergi mendukung berjalannya kebijakan tersebut. Kemudian pada tahap evaluasi, terbagi atas evaluasi skala menengah, skala panjang, dan skala tahunan yang diterapkan di seluruh proses kebijakan

mulai dari formulasi, implementasi, dan lingkungan kebijakan. Kemudian implikasi dari kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini adalah terciptanya peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah serta terbentuknya penguatan lembaga pendidikan agama dan keagamaan di Provinsi Jawa Timur.

4. Tesis oleh Muhammad Azani, S.Th. I dengan judul “*Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*”²⁴

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera membangun pola pelebagaan sedang/moderat. Proses administrasi caleg merupakan tanggung jawab Tim Khusus yang disebut tim PANJATIDA. Kemudian daftar caleg dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri DPD PKS dan Tim PANJATIDA untuk kemudian disahkan dan ditempatkan sebagai calon legislatif (caleg). Seluruh kader tingkat madya ke atas memiliki hak suara untuk memilih caleg resmi DPD PKS. Sedangkan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki pola pelebagaan optimal untuk caleg dari partainya. Tim 7 yang merupakan tim khusus memiliki hak prerogative dalam menentukan skor, nomor urut, dan mengesahkan caleg yang lolos seleksi.

PKS dan Golkar memiliki kesamaan dalam proses pencalonan dan penetapan calon legislatif. Persamaan dalam prosedur dan mekanisme pencalonan, kedua partai sama-sama mendapat keuntungan dari adanya

²⁴ Muhammad Azani, “Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta”, Tesis, (Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2010)

pedoman penyusunan caleg dari pemerintah. Persamaan dalam proses pencalonan adalah kedua partai lebih berfokus pada aspek teknis-administratif seperti komitmen dan loyalitas kepada partai, dibanding aspek kualifikasi dan kualitas seperti komitmen terhadap aspirasi publik.

5. Jurnal Penelitian oleh Nurul Azizah dengan judul “*Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)*”²⁵

Penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen politik PPP telah dilakukan dengan baik, dimana penyusunan program kerja partai terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi dari segala bentuk komunikasi politik yang dilakukan partai. Dalam tahap perencanaan, komunikasi politik bersumber dari aspirasi masyarakat Jawa Timur yang dikombinasi dengan program rencana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur (DPW PPP). Proses ini bergantung pada komposisi pengurus ahrian partai sebagai tim perencana dimana perlunya keterlibatan seluruh pengurus harian untuk tercapainya keutuhan dan solidaritas pengurus harian.

Kemudian dalam tahap pengorganisasian, DPW PPP bekerjasama dengan ahli-ahli ilmu politik dan Tim yang berkompeten untuk memberikan arahan terhadap penyaluran aspirasi yang diterima oleh partai. Tahap selanjutnya

²⁵ Nurul Azizah, “Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)”, dalam *Jurnal KARSA*, Vol. 22 No. 2, Desember 2014.

adalah monitoring dan evaluasi terhadap komunikasi politik PPP yang menjadi salah satu sarana utama penyalur aspirasi masyarakat. Namun dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam proses penyelesaian dan tindak lanjut dari DPW PPP serta belum adanya mekanisme pertanggungjawaban yang konkrit.

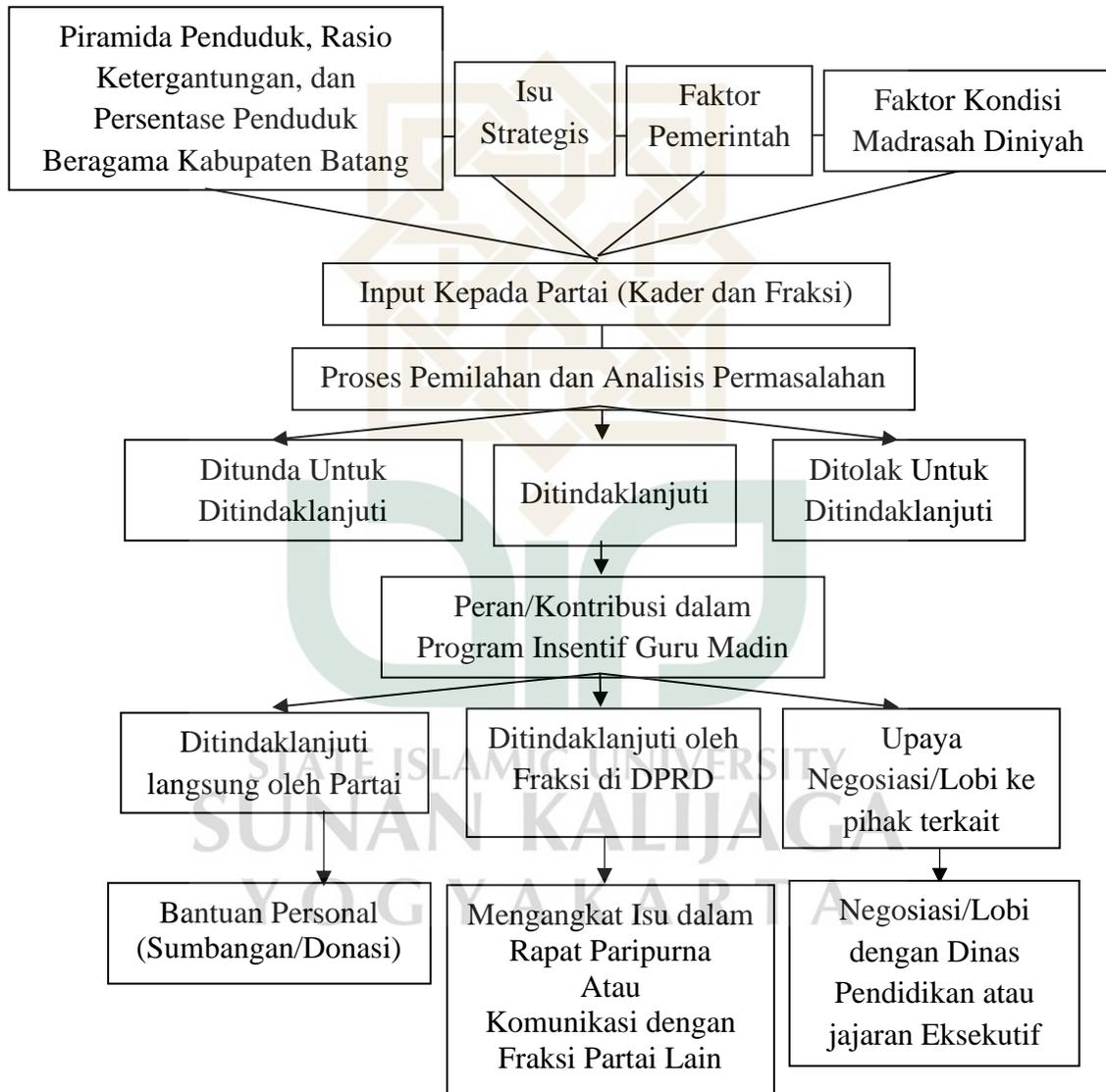
Penelitian-penelitian diatas memiliki perbedaan dibandingkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti kemudian mengembangkan serta melengkapi penelitian yang telah dipaparkan diatas tersebut. *Pertama*, Penelitian oleh Budi Supriyanto membahas dari segi perwakilan yang duduk di legislatif sebagai agen penyerap aspirasi masyarakat, dengan memanfaatkan aliansi sebagai jembatan memperoleh dukungan moral dan finansial, sementara peneliti membahas partai dari fungsi komunikasi politik dengan fokus utama aspirasi dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Istana dan Suranto fokus kepada peran partai politik dalam kebijakan publik, sementara peneliti fokus kepada kebijakan pendidikan secara khusus. *Ketiga*, disertasi oleh Ismail meneliti kebijakan madrasah diniyah mulai dari perancangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan peneliti meninjau sebuah kebijakan dari aspek Peran partai politik sebagai perwakilan suara masyarakat. *Keempat*, penelitian oleh Muhammad Azani meneliti aspek rekrutmen partai politik serta membandingkannya dengan partai politik yang lain. *Kelima*, jurnal ilmiah oleh Nur Azizah meneliti partai politik sebagai muara dan tempat masyarakat untuk beraspirasi dan menyampaikan pendapat dengan lokasi penelitian DPW PPP, sedangkan peneliti berfokus pada Peran partai secara spesifik pada suatu program yang dimiliki oleh pemerintah

daerah. Penelitian ini berperan sebagai penelitian verifikasi dari penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini berfungsi untuk memverifikasi Peran partai politik dalam kebijakan seperti yang telah dijabarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan proses verifikasi ini, diharapkan penelitian ini dapat menemukan temuan-temuan baru yang memperkuat statement-statement penelitian sebelumnya tentang Peran strategis yang dimiliki partai politik.

E. Kerangka Berfikir

Peran partai politik didalam sebuah kebijakan diatarbelakangi oleh berbagai faktor di lapangan. Faktor-faktor tersebut berupa Potensi, Kendala, dan Kondisi Sumber Daya Kabupaten Batang, kemudian Isu strategis yaitu Isu Kesejahteraan Guru, Faktor Pemerintah, dan Faktor Kondisi Madrasah Diniyah dan Masyarakat di Kabupaten Batang. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai input-input kepada PDI Perjuangan baik yang berada di struktur partai, maupun yang berada di fraksi partai dalam lembaga legislatif. Sebelum mengalami proses lebih lanjut, segala bentuk input mengalami proses pemilahan dan analisis oleh kader-kader partai. Kemudian hasil proses analisis dan pemilahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis oleh internal partai dan diberikan tindak lanjut baik dalam tingkat rapat internal sampai tingkat rapat paripurna dalam pemerintahan. Tindak lanjut dari PDI Perjuangan dapat berupa bantuan langsung dari struktur atau kader partai, upaya negosiasi/lobi ke instansi terkait dan jajaran eksekutif, serta bentuk pembahasan isu secara formal dalam rapat lembaga legislatif. Tindakan-tindakan

tersebut merupakan bentuk Peran dari PDI Perjuangan dalam program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang.



Gambar 1: Skema Kerangka Berfikir Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian dimana hasil penelitian berupa data deskriptif dan kata tertulis atau lisan dari individu serta perbuatan dan tingkah laku bersumber dari fakta²⁶. Sementara penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada data berupa rangkaian kata atau gambar sebagai hasil diterapkannya penelitian kualitatif²⁷.

Penelitian ini berfokus pada peran PDI Perjuangan dalam program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama elemen-elemen partai yaitu anggota legislatif Fraksi PDI Perjuangan di DPRD periode tahun 2016-2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah khususnya Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan dan fraksi di DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kabupaten Batang dipilih oleh peneliti karena dalam dua periode terakhir, PDI Perjuangan merupakan partai dominan dalam pemilihan umum.

²⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4

²⁷ *Ibid.*, hlm 11

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi objek penelitian yang dibahas. Selain itu fokus penelitian juga berfungsi agar perhatian peneliti tidak teralihkan karena banyaknya temuan dilapangan. Fokus penelitian lebih mengarah pada informasi terbaru yang didapat dari situasi politik dan sosial, dengan harapan untuk membatasi penelitian dalam menyaring mana data yang relevan dan data yang tidak relevan²⁸. Penelitian ini terfokus pada Peran partai PDIP dalam program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang saja.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala aspek dan informasi yang dapat dipakai dalam penelitian sebagai data. Berdasarkan sumber, terdapat dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan khusus menjawab permasalahan penelitian²⁹. Data primer bisa juga disebut data terbaru atau data asli bersifat *up to date*. Data primer peneliti peroleh dari data lapangan, dan data dikumpulkan langsung dari sumber, misalnya bersumber dari anggota PDI Perjuangan, Fraksi DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum yang terkait.

²⁸ *Ibid.*, hlm 127.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 137

- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data sekunder dan dapat diakses dengan cepat³⁰. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, baik dari Biro Pusat Statistik (BPS), Biro Hukum Partai, Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Batang, media massa, serta dokumen pendukung berupa buku, jurnal, laporan, surat, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini pejabaran lebih lanjut:

a. Observasi. Observasi merupakan kapasitas seorang individu memaksimalkan proses pengamatan dengan bantuan panca indera mata atau panca indera lainnya³¹. Dengan kata lain, observasi adalah proses mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan³², dimana peneliti tidak terlibat dan hanya berperan sebagai pengamat dalam mengumpulkan data mengenai peran PDI Perjuangan dalam Kebijakan

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). Hal 115

³² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 204

Pendidikan yaitu Program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang.

- b. Wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai bertemunya dua orang atau lebih yang kemudian bertukar informasi serta ide dengan perantara tanya jawab, yang menghasilkan makna dan intisari atas sebuah topik atau permasalahan³³. Dalam penelitian ini akan menerapkan wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti akan mewawancarai beberapa pihak dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, namun peneliti juga dapat menanyakan perihal diluar pedoman wawancara jika dirasa perlu³⁴. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Irfai, Staf Divisi Pendidikan Pondok Pesantren dan Diniyah
- 2) Bapak Riharso, Fraksi PDI Perjuangan Komisi D DPRD Kabupaten Batang
- 3) Bapak Rasmani, Pembina Madrasah Diniyah di Desa Pucanggading Tengah
- 4) Ibu Maryati, Guru di Madrasah Diniyah Uswatun Hasanah
- 5) Bapak Wibowo Mahendro, anggota PDI Perjuangan Kabupaten Batang

³³*Ibid.*, hlm 211

³⁴ D. Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 77

6) Bapak Budhi Sriharyanto, anggota PDI Perjuangan Kabupaten Batang

Teknik pengambilan data dari narasumber menggunakan teknik *snowball*, yaitu teknik pengambilan sampel dari wawancara orang pertama lalu mengembangkannya dengan mewawancarai narasumber berikutnya yang mempunyai kaitan dengan topik wawancara³⁵. Informan-informan pihak pertama ialah pihak yang terlibat dan mengerti latar belakang peran partai politik dalam kebijakan pendidikan, baru kemudian dikembangkan dalam proses wawancara informan-informan yang terlibat dalam hal teknis.

- c. Dokumentasi. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang³⁶. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang tersebar sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu peran partai politik dalam formulasi kebijakan pendidikan. Dokumen ini dapat bersumber dari partai politik, dalam hal ini DPP, DPD dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lain seperti media massa dan kelompok masyarakat.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 54

³⁶ *Ibid.*, hlm 213

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi peran Partai Politik PDIP terhadap kebijakan pendidikan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Menurut Miles and Huberman³⁷, berikut langkah-langkah analisis dalam tahap pengumpulan data:

- 1) Memilih dan menyederhanakan data mentah yang didapat dari pengamatan dan kejadian di lokasi penelitian.

³⁷ Miles, M.B & Huberman A.M., *Analisis Data Kualitatif*, Terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal 130

- 2) Kodifikasi hasil pilahan data mentah dengan memperhatikan struktur dan perincian yang integratif.
- 3) Membuat catatan obyektif sekaligus klasifikasi dan editing jawaban serta situasi dalam analisis selama proses pengumpulan data.
- 4) Pembuatan catatan seputar pikiran dan opini peneliti menyangkut catatan pada tahap analisis selama pengumpulan data
- 5) Membuat catatan marginal yang merupakan komentar substansial dari peneliti
- 6) Melakukan penyimpanan data dengan memperhatikan aspek pemberian label, format seragam, dan angka indeks yang terorganisasi.
- 7) Pembuatan memo dalam proses analisis data yang dapat berupa teori ide, konsep, serta pendapat.
- 8) Analisis antarlokasi, dilakukan jika penelitian dilakukan di lebih dari satu lokasi, atau lebih dari satu staf peneliti. Data yang didapat perlu didiskusikan dan disatukan.
- 9) Membuat ringkasan awal yang benyiratkan ada tidaknya data yang ditemukan di lokasi penelitian. Diharapkan peneliti memiliki wawasan luas, sehingga mampu melakukan aktifitas reduksi data dengan baik.

b. Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan. Bentuk penyajian data penelitian kualitatif pada umumnya berupa rangkaian kata dan tindakan perorangan dalam suatu situasi yang relevan dalam aspek-aspek berkaitan serta peran seseorang situasi sosial tertentu³⁸

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluting Drawing*)

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Kesimpulan awal yang pernah dibuat dapat saja berubah seiring dikumpulkannya data-data serta fakta penelitian.

³⁸ *Ibid.*, hal 133

Verifikasi data merupakan proses dalam mendapatkan bukti ilmiah untuk mendukung proses pengumpulan data yang berkelanjutan³⁹. Proses verifikasi diperlukan dalam proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang baik dan kredibel dapat dilihat dari konsistensi dan kesamaan antara kesimpulan awal dengan kesimpulan yang peneliti temukan di lapangan.

7. Teknik Keabsahan Data

Berikut adalah kriteria-kriteria yang peneliti gunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain⁴⁰:

a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Fungsi derajat kepercayaan yaitu, *Pertama*, penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, menampilkan derajat kepercayaan hasil-hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

1) Triangulasi

Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Data penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain

³⁹ *Ibid.*, hal 134

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm 324

sebagai pembanding hasil wawancara terhadap objek penelitian⁴¹. Triangulasi dalam sebuah penelitian dapat berfungsi untuk mencocokkan dan memeriksa kebenaran suatu data, serta juga dapat memperkaya data penelitian⁴². Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengajukan berbagai variasi pertanyaan, membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara, mengeceknya dengan berbagai sumber data, serta memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.

2) Kecukupan Referensial

Suatu kegiatan menghimpun bahan, notasi, naskah notulen, atau rekaman yang mendukung penelitian dan dapat dijadikan patokan dalam proses analisis dan penafsiran data.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan dibentuk oleh kegiatan peneliti dalam menemukan dan mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan keteralihan dengan menggali dan mengumpulkan data empiris dalam konteks peran partai politik PDI Perjuangan dalam rumusan kebijakan pendidikan. Dalam melakukan keteralihan tersebut, peneliti mendiskusikan data-data di lapangan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 330

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm 115

dengan pembimbing mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk mengetahui dan memastikan penelitian berjalan sesuai peraturan, peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing mengenai data-data yang didapat lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

d. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian yang objektif. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

G. Sistematika Penelitian

Tesis ini disusun dalam 5 bab yang secara sistematika membahas keseluruhan isi penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi ke beberapa bagian yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan berisi latar belakang masalah, merangkum inti permasalahan dan poin penting alasan dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, untuk itu juga dalam mempermudah pencarian tujuan tersebut juga harus melalui metode penelitian, dan dibuatlah sistematika penulisan tesis ini untuk mempermudah untuk melakukan pembahasan.

Bab II, landasan teoretik yang berisi tentang penjabaran teori tentang konsep partai politik dan konsep kebijakan pendidikan. Pembahasan partai politik mengenai definisi, fungsi, tujuan partai, dan mekanisme demokrasi internal. Sedangkan konsep kebijakan pendidikan membahas tentang definisi kebijakan, teori perumusan, proses perumusan kebijakan, hubungan politik dan pendidikan, serta aktor yang berperan.

Bab III, gambaran umum objek penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang profil, sejarah, visi-misi, serta tugas PDI Perjuangan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam bab ini akan dibahas pula tentang profil Kabupaten Batang sebagai daerah dimana program insentif guru Madrasah Diniyah dijalankan.

Bab IV, Berisi pembahasan tentang jawaban permasalahan penelitian, yaitu latar belakang Peran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

program Insentif Guru Madrasah Diniyah. Kemudian dilanjutkan dengan perincian Peran seperti apa yang dijalankan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Batang terkait Program Insentif tersebut.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini berisi tentang kesimpulan yakni sebagai jawaban singkat atas problematika yang diangkat dalam permasalahan, di samping berisi tentang saran-saran dan rekomendasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor latar belakang Peran PDI Perjuangan dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang adalah Faktor motivasi dari Pemerintah sehingga membuat kebijakan program tersebut, dan Faktor Kondisi Madrasah Diniyah dan Masyarakat yang memicu keprihatinan aktor-aktor pembuat kebijakan dalam membuat program.
2. Peran PDI Perjuangan dalam Program Sosial Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang merupakan peran yang muncul sebagai pengamalan fungsi politik oleh PDI Perjuangan sebagai suatu organisasi berbasis massa yang menjalankan tanggung jawabnya di masyarakat, baik sebagai Institusi Partai Politik, maupun sebagai bentuk perwakilan suara masyarakat di dalam pemerintahan daerah.
3. Penyebab PDI Perjuangan berperan dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah Kabupaten Batang berupa faktor Piramida Penduduk, Rasio Ketergantungan, dan Persentase Penduduk Beragama yang menunjukkan bahwa kondisi penduduk Kabupaten Batang dalam memicu munculnya program insentif. Kemudian faktor isu kesejahteraan guru yang merupakan isu strategis nasional, serta

B. Saran

Berdasarkan paparan penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai peran PDI Perjuangan dalam Program Insentif Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Batang, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan pemahaman lebih mendalam kepada para kader PDI Perjuangan dalam upaya menyerap aspirasi di masyarakat (komunikasi politik), serta diberikan pendidikan politik menyeluruh tentang apa kewajiban dan hak para kader sebagai lembaga perwakilan politik di masyarakat.
2. DPC PDI Perjuangan lebih aktif untuk membaur di forum-forum kecil di masyarakat untuk menjalin komunikasi lebih mendalam tentang kebutuhan masyarakat terkait lembaga pendidikan non-formal.
3. Dengan kondisi Kabupaten Batang yang memiliki jumlah Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang relatif banyak, diharapkan bahwa PDI Perjuangan lebih dekat kepada lembaga-lembaga tersebut untuk membantu problematika yang dihadapi dan memberikan solusi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: IKAPI, 1998.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Dahar, *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Erlangga, 1982.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik - Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Hamid, Ahmad. F, *Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemirnaan, 2008.
- Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Cet. I*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Imron, Arifin, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Sinar Grafika, 2000.
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977.
- Kelly, Norm dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Prakti*, Washington: The National Democratic Institute (NDI).
- Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.

- Kuper, Adam dan Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Cet I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Madani, Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masoed, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 1989.
- Mas' oed, Mochtar dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Cet. III*, Jakarta: Kantor Perwakilan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, 2012.
- Miles, M.B & Huberman A.M., *Analisis Data Kualitatif, Terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohid*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulyana, D., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munadi, Muhammad, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Nugroho, Riant, *Public Policy (Edisi Revisi)*, Jakarta: IKAPI, 2009.
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Patton, Carl, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, London: Prentice Hall, 1993.
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

- Sirozi, M., *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Cet. Ke-1*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suprihartini, Amin, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Supriyoko, Ki, *Hakikat Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Tabroni, Roni, *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Cet. Ke 3*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tilaar, H. A. R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Topatimasang, Roem, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik, Cet. Ke 5*, Yogyakarta: Insist Press, 2005.
- Toyamah, Nina dkk, *Laporan Penelitian Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil*, Lembaga Penelitian SMERU: Jakarta, 2011.
- Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Wahab, Solichin Abdullah, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke- Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik Cet. I*, Jakarta: Bumi Karsa, 2012.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo: Yogyakarta, 2002.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakyat, 1983.

Tim Penyusun, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 – 2024.

Tim Penyusun, Bappeda Kabupaten Batang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Tim Penyusun, Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 2019.

Tim Penyusun, Data BPS Pondok Pesantren, Kyai Ustadz dan Santri Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2014-2015.

Tim Penyusun, Data Kementrian Wilayah Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 11 April 2019

Tim Penyusun, Infografis Data Strategis Kabupaten Batang Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, Tahun 2019.

Tim Penyusun, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7183 Tahun 2017.

Tim Penyusun, Perbup Batang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018.

Tim Penyusun, PP No 55 Tahun 2007.

Tim Penyusun, Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009.

Tim Penyusun, UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tim Penyusun, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

Tim Penyusun, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011.

Tim Penyusun, UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.

Tim Penyusun, UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014.

Tim Penyusun, UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Tim Penyusun, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2019.

Tim Penyusun, Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2017.

Tim Penyusun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010.

Referensi dari tesis dan jurnal

Abdurrasyid, *Madrasah Nizhamiyah: Studi Tentang Hubungan Pendidikan Islam dan Politik*, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1994).

Azani, Muhammad, *Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Azizah, Nurul, *Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus di DPW PPP Jatim)*, dalam Jurnal KARSA, Vol. 22 No. 2, Desember 2014.

Ismail, *Politik Pendidikan Islam Di Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah)*, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya: PPS UIN Sunan Ampel, 2017.

Istana dan Suranto, *Peran Partai Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi Kasus PDIP Kabupaten Kulonprogo Periode 2010-2012*, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 2, Juni 2014.

Itniyo, Pandri, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2011*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.

Jungblut, Jens, *Partisan Politics in Higher Education Policy: How Does the Left-Right Divide of Political Parties Matter in Higher Education Policy in Western Europe?*, Higher Education in Societies. Brill Sense, 2014.

Hartono, Yudi, *Pendidikan Dan Kebijakan Politik Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi*, Jurnal Agastya, Vol. 6, No. 1, Januari 2016.

Hutabarat, Ramly, *Peran Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Hukum Politik yang Tidak Semantik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 Juli September 2005.

Maulana, M. Fahmi. *Dampak Kesejahteraan Guru PAI MI/SD Terhadap Kompetensi Profesional (Studi Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2018.

Nasution, Rusly ZA, *Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global*, dalam Jurnal Educare, Vol. 5, No. 1, Agustus 2007.

Nice, David C., *State Party Ideology and Policy Making*, in Policy Studies Journal, Vol. 13, Issue 4, 1 Jun 1985.

Nizah, Nuriyatun, *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*, dalam Jurnal Edukasia, Vol. 11, No. 1, Februari 2016.

Rosyadi, Hendi, *Perumusan Kebijakan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Kasus Perumusan Visi Misi Kabupaten Bekasi)*, Jurnal Paradigma, Volume 5, No. 1, 2004.

Syuhud dan Wiwin Sugianto, *Konsep Profesionalitas Guru Perspektif Masyarakat Pesantren*, Jurnal Tarbiyatuna, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2018.

Sunarso, *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*, Jurnal Civics, Vol. 4, No. 2, Desember 2007.

Trimulyono, A. dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Batang Jawa Tengah Melalui Pengembangan Industri Galangan Kapal Tradisional*, dalam Jurnal Info, Edisi 18, No. 1, Februari 2016.

Wibowo, Udik Budi, *Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik*, dalam Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 1, Maret 2013.

Rujukan Web

<https://kesbangpol.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/DPRD-KABUPATEN-BATANG-2014-2019.pdf> diakses tanggal 12 Januari 2020 pukul 21.02

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-hasil/wilayah> diakses 12 Januari 2020 pukul 21.38

https://pemilu2014.kpu.go.id/da1_dprd2.php diakses 12 Januari 2020 pukul 20.29

http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail_kondisi_geo/3 diakses pada 23 Februari 2020 pukul 00.45.